**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG**

Oleh:

Boy Tagajagawani

NPM: 139020006

**ABSTRAK**

Penelitian ini fokus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. Penelitian bertujuan Mengkaji implementasi kebijakan, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan dan strategi yang harus dilakukan agar pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung. Pendekatan penelitan yang digunakan adalah pendekatan kombinasi (*Mixed-Methods*) dengan strategi *concurent embedded,* dalam penelitian ini penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* (FGD). Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT dengan hasil akhir dari analisis SWOT adalah menghasilkan suatu srtategi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung*.*

Hasil penelitian ini adalah (1). Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM tirtawening Kota Bandung belum efektif hal ini didasarkan atas besarnya peluang terkait dengan demand yang ada namun pertumbuhan perusahaan rendah meskipun pendapatan stabil. (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung adalah pada aspek Sumber daya, Agen pelaksana dan Dispososi/sikap para pelaksana. (3). Hasil penelitian pengelolaan air limbah PDAM Tirtawening Kota Bandung, menggambarkan bahwa posisi perusahaan berada pada kondisi yang memiliki kekuatan internal yang cukup besar, namun terdapat ancaman yang cukup besar, oleh karena itu strategi yang ditempuh adalah melalui strategi diversifikasi (*diversification*), horizontal konsentris melalui pengembangan kelembagaan.

Saran penelitian ini adalah (1). Pemerintah Daerah Kota Bandung, dapat mempertimbangkan pembentukan kelembagaan khusus atau BUMD Air Limbah Domestik dalam upaya percepatan penanganan air limbah domestik di Kota Bandung. (2). Komitmen dan perhatian di PDAM dalam peningkatan pengelolaan air limbah domestik, (3). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan stakeholders, (4). Memanfaatkan praoduk hasil olahan dari pengelolaan air limbah domestik, dan (5). Peningkatan sumber daya pengelolaan air limbah domestik.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, pengelolaan air limbah domestik, strategi implementasi kebijakan.

**Latar belakang**

Lingkungan perkotaan saat ini menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah, karena memiliki tantangan besar dalam mempertahankan tata kelola lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Lingkungan perkotaan khususnya yang dimiliki Kota Bandung juga menjadi perhatian banyak pihak, hal ini disebabkan pola hidup masyarakat yang perlu melakukan pneyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut diantaranya terjadinya urbanisasi yang terus meningkat, terkonsentrasinya penduduk pada suatu titik lokasi, munculnya perumahan kumuh dengan kualitas sanitasi yang kurang baik seperti terbatasnya air minum, penataan lingkungan yang kurang mendukung dan pengolahan air limbah domestik yang tidak memadai. Berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung, masih menjadi persoalan karena masih rendahnya pemahaman air limbah domestik dan manfaatnya pada sebagian penduduk Kota Bandung semakin mendorong terjadinya masalah pada sistem pengelolaan air limbah domestik.

Kebijakan penanganan air limbah, khususnya air limbah domestik diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun untuk pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dan dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung. PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan institusi penyelenggara selain pelayanan air minum, juga memberikan pelayanan air limbah domestik di Kota Bandung. Sampai dengan Desember 2019, jumlah pelanggan air limbah domestik PDAM Tirtawening, baik yang melalui perpipaan (*off-site system*) maupun melalui penyedotan Tangki septik (*on-site system*) sebanyak 160.843 Sambungan Rumah, (BPAL: 2019)

Tugas pokok PDAM Tirtawening termuat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 236 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah bergerak di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan air limbah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terciptanya kesehatan masyarakat dan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman yang bersih, sehat dan berkesinambungan”. Pentingnya kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung dikarenakan kebutuhan masyarakat Kota Bandung yang Nyaman, Unggul, Sejahtera dan Agamis. Penelitian-penelitian mengenai strategi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung, masih belum dilakukan oleh para peneliti lain. Berdasarkan studi dokumen yang didapatkan oleh peneliti bahwa penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai implementasi kebijakan terkait dengan pencemaran air (Sugara, 2017), implementasi kebijakan pengelolaan air limbah rumah sakit (Chotijah dkk, 2017), implementasi kebijakan pencemaran limbah cair hotel (Yuda & Purnomo, 2017), evaluasi kebijakan pengelolaan air limbah, selanjutnya Susanti.,et al (2018) Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berasal dari Jurnal Ilmiah Nasional dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir tersebut mengidentifikasikan bahwa penelitian yang telah dilakukan belum ada yang membahas mengenai strategi implementasi kebijakan dan penelitian yang terkait dengan strategi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung merupakan penting untuk diteliti dan belum ditemukan penelitian yang mengkaji pembahasan strategi implementasi kebijakan yang lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung, berdasarkan fakta ilmiah tersebut maka peneliti dapat mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini memiliki orisinalitas dalam penelitian ini.

Kondisi saat ini menjukkan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, khususnya untuk pengelolaan air limbah terpusat (perpipaan) diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang dengan debit air outlet rata-rata mencapai 67.344 meter kubik per-hari (BPAL: 2019). Debit ini akan terus meningkat sesuai peningkatan jumlah penduduk, sehingga kodisi IPAL Bojongsoang, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan yang lebih baik lagi. Untuk mengembangan jaringan perpipaan air limbah yang dikelola oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung juga melakukan pengembangan melalui pemasangan *trunksewer* dan pemasangan jaringan pipa lateral. Penambahan sambungan air limbah dan dukungan program dari pemerintah pusat, menjadi target dalam upaya meningkatkan layanan pengelolaan air limbah domestik, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sumber : BPAL, 2019

**Tabel. 1. Debit Pengolahan IPAL Bojongsoang**

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas perlu dilakukan kebijakan dimasa mendatang mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung agar pengelolaan air limbah domestik dapat diatasi lebih baik lagi, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan fakta empiris terdapat fenomena masalah berkenaan dengan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, hal ini didasarkan atas observasi langsung selama peneliti menjadi salah satu direksi yaitu direksi air limbah di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Adapun fenomenanya adalah (1). Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang air limbah domestik masih rendah, hal ini masih terdapat masyarakat Kota Bandung yang belum merubah pola hidup karena masih ada yang membuang air besar ke sungai. (2). Sarana dan prasarana pelayanan air limbah yang dilaksanakan PDAM Tirtawening Kota Bandung maupun dari pemerintah kota belum memadai, hal ini diperlukan kebijakan dibidang anggaran agar dapat berjalan degnan baik. (3). Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam penanganan pelayanan air limbah domestik, hal ini karena ketersediaan SDM yang ada belum mampu menyelesaikan kebutuhan dalam pengelolaan air limbah domestik. (4). Perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam penanganan air limbah domestik karena saat ini masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik. (5). Belum adanya peraturan khusus dalam pengelolaan air limbah domestik, hal ini regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mengatur secara khusus pengelolaan air limbah. (6). Masih belum terintegrasi penanganan air limbah domestik secara menyeluruh. Berdasarkan fakta empiris yang didasarkan atas femonena masalah tersebut di atas, maka pentingnya penelitian yang mengkaji tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung,

**Landasan Teoritis**

**Konsep kebijakan publik**

Carl Friedrich (Wahab,2004:3) mengatakan bahwa: “Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang. Menurut Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt ( Suharto Edi, 2008:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip–prinsip untuk mengarahkan cara–cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, (Sujarwani: 2016)

Secara realistik, pengertian kebijakan publik harus mencakup seluruh tindakan pemerintah, tidak hanya maksud (*intention*) yang dinyatakan oleh pemerintah atau pejabat publik (Dye, 2016, p.1). Sedangkan Carl Friedrick menekankan pentingnya unsur tujuan dalam kebijakan : “*it is essential for the policy concept that there be agoal. Objective, or purpose*” (Dye, 2016, p.3). Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“ is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Kebijakan publik diartikan sebagai alokasi nilai-nilai secara otoratif oleh lembaga/pejabat pemerintahan yang bersifat normatif dan mengikat serta koresif bagi implementasinya yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang dikembangkan dalam suatu sistem pemerintahan. Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Berdasarkan pendapat diatas, kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. menurut pendapat Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Winarno (2007), menjelaskan bahwa implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Definisi kebijakan publik maka dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (1). Kebijakan publik dilihat seabgai tindakan yang dibut oleh administratur Negara, (2). Kebijakan publik sebagai usaha yang mengatur kehidupan bersama, (3). Sesuatu dianggap kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat langsung, (Rusli: 2013).

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan publik dalam upaya pencapaian hasilnya selalu menimbulkan berbagai kemungkinan sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrator. Hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan dari tujuan yang ingin dicapai atau sebaliknya dapat pula tidak berhasil mencapai apa yang diharapkan. Menurut Wahab (2012:192-201) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi: (a). Kondisi sosio ekonomi dan teknologi, (b). Dukungan public, (c). Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok, (d). Dukungan dari pemerintah pusat, (e). Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Di samping itu, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurut Islamy (2009:107), bahwa kebijakan pemerintah akan menjadi efektif, bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007:102). Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno, 2007:110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya

Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2013:105-107), mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

1. Sumber daya. Menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien.
2. Komunikasi antar badan pelaksana. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya sering dilaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan, agar dapat mendukung komunikasi organisasi antar institusi yang berkaitan dengan program/ kebijakan dengan kelompok sasaran yang mampu memahami serta bertanggungjawab atas program yang dilaksanakan.
3. Karakteristik badan pelaksana. Menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalambirokrasi.
4. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
5. Sikap pelaksana. Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa besar demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan, beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.”

Keterkaitan antar variabel dalam model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat berikut:

Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2013:107).

**Gambar.1. *Model of Policy Implementation Process* (Model Proses Implementasi Kebijakan)**

Berdasarkan konsep teori di atas, Nugroho, (2017) juga menyampaikan bahwa ada 6 (enam) indikator penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Enam indikator penilaian keberhasilan dalam suatu kebijakan tersebut adalah (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana dan (6) lingkungan eksternal. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tersebut lebih dapat menjawab rumusan masalah dan lebih sesuai dengan karakter penelitian yang akan dilakukan. Hal ini karena model Van Meter dan Van Horn membahas berbagai aspek dalam implementasi kebijakan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung.

Konsep Dasar Pengelolaan Air Limbah Domestik

Konsep dasar air limbah, bahwa setiap air yang telah dipergunakan akan menjadi air buangan. Air buangan yang telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kegiatan sehari-hari pada umumnya telah terkontaminasi zat kimia atau alami (limbah). Air limbah dapat berdampak pada munculnya penyakit dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu air limbah wajib untuk dikelola.

Pemerintah Kota Bandung yang berwenang dalam pengelolaan air limbah menunjuk PDAM Tirtawening sebagai institusi penyelenggara pengelolaan air limbah di Kota Bandung. Namun untuk penanganan air limbah, Pemerintah Kota Bandung menetapkan batasan ruang lingkup air limbah itu sendiri, yaitu air buangan rumah tangga (domestik) tidak termasuk air buangan industri ataupun air hujan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 270 Tahun 2013 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 12, bahwa “Air limbah adalah air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan”. Adapun untuk pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, bahwa PDAM Tirtawening selain sebagai penyelenggara pelayanan air minum juga pengelolaan air limbah di Kota Bandung. Konsep dasar air limbah dapat dilihat pada gambar berikut:

Air Buangan (limbah) Rumah Tangga (Domestik) tidak termasuk buangan industri & air hujan

Mengandung zat beracun yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit dan pencemaran lingkungan

Dikelola agar Kualitas air memenuhi baku mutu

**Gambar 2. Konsep Dasar Air Limbah**

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bawha air limbah merupakan air buangan rumah tangga (domestik) yang mengandung zat beracun sehingga mengakibatkan munculnya penyakit dan gangguan pencemaran lingkungan. Buangan industri dan air hujan tidak termasuk kedalam air limbah. Air limbah perlu dikelola agar kualitas air memenuhi baku mutu.

**Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam strategi implementasi kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air limbah domestik yang dijalankan oleh PDAM Kota Bandung. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah PDAM Kota Bandung sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung.Dalam penelitian ini adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan pendekatan kombinasi (*Mixed-Methods*) dengan strategi *concurent embedded,* dalam penelitian ini penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama untuk mendukung penelitian yang akan diteliti.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan penelitian ini menggali dan mengumpulkan informasi dan fakta dari informan sebagaimana adanya menurut pandangan informan itu sendiri dengan cara mengumpulkan data berupa fakta yang diungkapkannya apa adanya, sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian harus terangkum dalam bentuk instrumen yang ringkas atau sederhana, namun terperinci terkait dengan implementasi kebijakan pngelolaan air limbah di Kota Bandung, yang akan dijadikan sebagai alat pengukuran. Oleh karena itu, metode penelitian campuran (*Mixed Methods*), dua jenis metode penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam studi kualitatif adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta *Focus Group Discussion*, adapaun Teknik pengumpulan data kuantitatif akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden terpilih, yaitu petugas pelaksana dan unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Berkaitan denga analisis data, Analisa data kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Analisa implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung dilakukan akan menggunakan langkah-langkah analisa data kualitatif melalui analisis SWOT. Hasil akhir dari analisa adalah menghasilkan suatu strategi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung.

**Hasil Penelitian**

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku hingga saat ini, yaitu, (a). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, dan (b). Peraturan Walikota Bandung No. 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening Kota Bandung. Berdasarkan data studi dokumen dan observasi menunjukkan bahwa kebijakan yang dijakankan oleh PDAM Tirtaweing Kota Bandung didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan turunan kebijakan yang juga menjadi acuan dalam pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan dalam pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, dari hasil studi dokumen, obsertasi dan wawacara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air limbah perlu ditingkatkan, hal ini apabila berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut dapat dilihat bahwa permintaan atau *demand* serta kebutuhan masyarakat di Kota Bandung khususnya dalam pelayanan air limbah sangat tinggi hal ini dilihat dari pelayanan dari berbagai industri dan juga masyarakat perkotaan yang perlu dilakukan penataan pengelolaan air limbah karena untuk mendukung visi dan isi Kota Bandung menjadi kota yang bersih dan nyaman tentunya diperlukan pengelolaan air limbah yang baik. Sementara dari aspek pertumbuhan yaitu pengelolaan air limbah yang saat ini dikelola oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung masih belum mencapai tingkatan yang optimal dalam aspek pertubuhan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori menurut Ramkuti (2001) yaitu *Matriks Portofolio* dari Boston Consulting Group. Menurut Jauch dan Glueck (1998) masuk dalam kategori *cash cow,* adalah produk atau divisi dengan pertumbuhan rendah, namun pangsa pasarnya tinggi. Karena pangsa pasar mereka mempunyai biaya rendah dan menghasilkan uang kas.

Dengan demikian apabila dilihat dari hasil penelitian ini dan didasarkan dari teori pertumbuhan pasar tersebut maka masih belum efektif dalam pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Maka yang perlu dilakukan oleh oleh perusahaan adalah bagaimana peluang yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik agar mampu meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar dan pendapatan dalam pengelolaan air limbah domestik tersebut. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan adaptasi kelembagaan dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya agar mendukung pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Berdasarkan hasil kuesioner dan didukung juga oleh hasil wawancara dalam penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan dalam pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Adapun aspek tersebut ialah (1). Aspek sumber daya dengan nilai presentase sebesar 62, 5 persen, (2). Aspek agen pelaksana dengan nilai presentase 68 persen dan (3). Aspek disposisi/aspek pelaksana dengan nilai presentase 68 persen dengan demikian hal ini menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan air limbah di Kota Bandung. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang diuraikan tersebut terdapat faktor yang diperlukan untuk melengkapi agar adanya efektivitas dalam pengelolaan air limbah dimestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, yaitu aspek kolaborasi. Karena tanpa adanya kolaborasi dalam pengelolaan air limbah tidak akan berjalan efektif, maka kunci utama dalam pengelolaan air limbah dalam implementasinya adalah harus mengikutsertakan konsep kolaborasi.

Berdasarkan analsisi SWOT, dari hasil perhitungan dari IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy)* dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Strategy*) serta SFAS (*Summary Factor Analysis Strategy*), maka dari hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal divisi pelayanan air limbah PDAM Tirtawening Kota Bandung, posisi berada di kuadran II yakni menggambarkan bahwa posisi perusahaan berada pada kondisi yang memiliki kekuatan internal yang cukup besar, namun terdapat ancaman yang cukup besar dari pesaing, oleh karena itu strategi yang ditempuh adalah melalui strategi diversifikasi (*diversification*).

 Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi diversifikasi (*diversification*), strategi diversifikasi yang dapat dilakukan adalah memalui melalui strategi horizontal konsentris. Ini merupakan strategi menambahkan produk baru yang masih terdapat hubungannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama, atau juga jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada sekarang ini. Maka berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan air limbah domestik saat ini memiliki peluang atau demand atau permintaan pasar yang tinggi sementara pertumbuhan rendah meskipun didukung pendapatan yang stabil. Maka hal yang utama adalah melakukan strategi diversifikasi horizontal konsentris dengan pengembangan kelembagaan, melalui penguatan terhadap kelembagaan agar pertumbuhan tinggi dan mampu menangkap peluang atau demand yang tinggi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung. Manfaat dari adanya diversifikasi suatu perusahaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profitabilitas serta Daya Saing
2. Dengan memiliki perusahaan (investasi) pada segala macam jenis produk akan mencegah pesaing untuk memonopoli pasar.
3. Resiko itu selalu ada di seluruh aktifitas hidup, hal itu juga yang selalu menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya diversifikasi ini maka secara tidak langsung akan mengurangi dampak resiko pada masa yang akan datang.
4. Apabila satu unit usaha mengalami kerugian, bahkan nyaris gulung tikar, masih terdapat unit usaha lainnya sehingga masih bisa survive.

Selanjutnya dilakukan Analisis TOWS (Threats, Opprtunities, Weakness and Strengths) digunakan untuk menganalisis alternatif strategi. Dari perumusan strategi yang telah dihasilkan melalui analisa SWOT di atas untuk pelayanan air limbah, maka Point Strategis Pengelolaan Air Limbah dihasilkan strategi.Berdasarkan hasil strategi kebijakan pengelolaan air limbah maka strategi untuk meningkatkan agar pengelolaan air limbah di PDAM Tirtawening Kota Bandung efektif adalah mengacu pada 6 aspek yang telah disampaikan di atas. Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat disimpulkan terdapat aspek yang menjadi perhatian yaitu:

1. Aspek kelembagaan
2. Aspek regulasi
3. Aspek kerjasama/kemitraan
4. Aspek pendapatan
5. Aspek pelayanan
6. Aspek kinerja

Adapun yang menjadi perhatian utama dalam meningkatkan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah aspek pengembangan kelembagaan. Hal ini sesuai hasil FGD yang telah dilaksanakan pada tanggal hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Subekti (Direktur Utama PD PAL Jaya DKI Jakarta) bahwa aspek kelembagaan perlu dielaborasi lebih lanjut. Perlunya fokus pada aspek kelembagaan dalam membuat strategi dalam penelitian ini, juga disampaikan oleh Ibu Triani selaku Dewan Pengawas PDAM Tirtawening Kota Bandung. Berdasarkan hasil FGD tersebut didapatkan masukkan bahwa aspek kelembagaan menjadi aspek kunci dalam membangun pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung.

 Berdasarkan hasil implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtaweing Kota Bandung yang belum efektif karena adanya permintaan pasar yang tinggi sementara pertumbuhan rendah, meskipun terdapat pendapatan yang stabil, dan berdasarkan poin strategi pengembangan kelembagaan maka sebagai upaya agar strategi pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, berjalan efektif maka diperlukan suatu upaya kemandirian kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung.

Dengan demikian beberapa pertimbangan apabila Pengelolaan Air Limbah Domestik membentuk kemandirian kelembagaan berupa BUMD sendiri dan tetap berkolaborasi dengan PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah:

1. Semakin banyaknya penduduk di Kota Bandung dan sekitarnya, yang membutuhkan pengelolaan air limbah domestik dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan.
2. Setiap 2 (dua) tahun sekali, dilakukan evaluasi tarif pelayanan air limbah domestik dan trendnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan.
3. Kota Bandung merupakan kota metropolitan sehingga banyak munculnya bangunan niaga yang akan dibangun seperti mall, hotel, apartemen, restoran, dan niaga besar lainnya, dimana sangat membutuhkan pengelolaan air limbah domestiknya sesuai dengan komitmen dalam menjaga lingkungan.
4. Semakin banyaknya jumlah pengelola tangka tinja swasta, baik yang berada di Kota Bandung maupun daerah penyangga Kota Bandung, serta membuang air limbah domestiknya ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Kota Bandung. Hal ini akan menambah pendapatan bagi perusahaan daerah air limbah domwstik Kota Bandung.
5. Belum dioptimalkan hasil olahan air limbah berupa lumpur hasil olahan dan kerjasamanya dengan dinas pertamanan maupun kehutanan, baik tingkat Kota maupun Provinsi.
6. Air hasil olahan di IPAL Bojongsoang menjadi perhatian bagi para pengusaha Industri tekstil untuk meningkatkan kebutuhan airnya guna proses pencelupan. Para pengusaha telah mencoba meminta ke PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk membeli air hasil olahan IPAL tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pabrik tekstil yang berada di sekitar IPAL Bojongsoang.
7. Dari beberapa kota yang ada di sekitar Bandung Raya, hanya PDAM Tirtawening Kota Bandung yang dapat memberikan jasa pelayanan air limbah domestiknya dalam melayani kebutuhan, tidak hanya bagi masyarakat/pelanggan PDAM Tirtawening namun juga untuk melayani air limbah permukiman yang ada di sepanjang jalur perpipaan air limbah menuju IPAL Bojongsoang (Kabupaten Bandung).
8. Kemandirian kelembagaan yang dibentuk lebih fokus dan berkomitmen dalam upaya meningkatkan pendapatan dan peningkatan pelayanan masyarakat perkotaan di Kota bandung dan sekitarnya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan perkotaan.
9. Potensi BUMD air limbah masih terbuka peluang mengingat selain pertambahan penduduk juga cakupan pelayanannya masih terus bertambah sesuai dengan harapan dan target pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bandung agar pada tahun 2024 seluruh masyarakat di Kota Bandung telah menikmati sanitasi aman, dimana air limbahnya terkelola dengan baik.
10. Walaupun pengelolaan airlimbah membetuk kelembagaan baru tetap membutuhkan kolaborasi dengan PDAM Tirtawening, mengingat selain implementasi keberhasilan suatu perusahaan di era sekarang ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak (stakeholders) juga PDAM tetap membutuhkan air limbah mengingat dalam penyusunan tarifnya salah satu unsur penyusunan tarif tersebut adanya pemeliharaan sumber air baku yaitu dengan bekerja sama BUMD Air limbah domestik. BUMD Air limbah pun masih membutuhkan PDAM terutama dalam penarikan jasa pelayanan air limbahnya dengan tetap bergabung dengan rekening PDAM (30% dari tarif air minum).
11. Pajak tarif air limbah saat ini sedang dibahas oleh kementrian PUPR dan BAPPENAS untuk dapat dhapuskan mengingat pelayanan air limbah domestik merupakan pelayanan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung.
12. Adanya peluang untuk kerjasama dengan negara donor ataupun negara maju dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung. Bantuan ini diharapkan selain dapat meningkatkan nilai investasi bagi BUMD air limbah domestik, juga dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pegawai yang berada di lingkungan BUMD Air limbah domestik.
13. Walaupun air limbah domestik masih dipandang sebelah mata, peneliti berkeyakinan dengan kehadiran kelembagaan pengelolaan air limbah domestik, selain meningkatkan pengelolaan air limbah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, juga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan terutama dalam meningkatkan penerimaan air limbah dari sektor industri dan niaga.
14. Adanya upaya untuk menyusun undang undang pengelolaan air limbah domestik di tingkat pusat sebagai upaya perhatian pemerintah pusat dalam menuntaskan perbaikan sanitasi lingkungan dari sanitasi dasar menjadi sanitasi aman sesuai dengan target Suistanable Development Goal’s. (SDG,s)

**Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, berdasarkan hal tersebut dengan ini dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung belum efektif , didasarkan atas pertumbuhan yang rendah dan *demand* yang tinggi di Kota Bandung. Meskipun pendapatan yang stabil. Serta beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu (a). Kurangnya keterlibatan dan kerjasama PDAM Tirtawening Kota Bandung dengan lembaga/dinas dalam program kegiatan pengelolaan air limbah domestik, (b). Kapasitas dan kapabilitas SDM air limbah domestik PDAM Tirtawening Kota Bandung masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kompetensi, (c). Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan air limbah domestik, masih perlu ditingkatkan, (d). Dukungan anggaran untuk biaya operasional air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung masih rendah, (e). Sebagian masyarakat masih mencampur dan membuang air limbah industri rumah tangganya ke dalam jaringan perpipaan air limbah domestik sehingga mengganggu proses pengolahan di IPAL Bojongsoang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung, yaitu aspek (1). Sumber daya, (2). Agen pelaksana dan (3). Dispososi/sikap para pelaksana, yang perlu dilakukan peningkatan.
3. Hasil penelitian pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung, dalam analisis SWOT berada pada posisi kuadran II, hal ini menggambarkan bahwa posisi perusahaan berada pada kondisi yang memiliki kekuatan internal yang cukup besar, namun terdapat ancaman yang cukup besar dari pesaing, oleh karena itu strategi yang ditempuh adalah melalui strategi diversifikasi (*diversification*). Adapun strategi diversifikasi dapat dilakukan melalui Strategi horizontal konsentris melalui pengembangan kemandirian kelembagaan, dengan prasyarat menjalankan kolaborasi dengan berbagai dinas/instansi/BUMD/pihak swasta dan stakeholders lainnya.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, serta aparat kewilayahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal pemicuan dan pemahaman sanitasi lingkungan, khususnya penanganan air limbah domestik;
2. Membangun *network planning and implementing*, serta memperhatikan budaya lokal secara bijaksana, terutama dalam memberikan pelayanan di dalam maupun diluar wilayah administrasi Kota Bandung.
3. Meningkatkan pemanfaatan produk hasil olahan yang digunakan sebagai pupuk tanaman dan *linkage market*-nya
4. Pemerinah Daerah Kota Bandung, agar segera mempertimbangkan pembentukan BUMD Air Limbah Domestik dalam upaya percepatan penanganan air limbah domestik di Kota Bandung.
5. Meningkatkan kualitas SDM/pegawai air limbah domestik di PDAM Tirtawening Kota Bandung, yang handal dan berkualitas.
6. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pegawai di lapangan sebagai implementor, maupun terhadap masyarakat/pelanggan sebagai target dari implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik PDAM Tirtawening Kota Bandung.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, terutama dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) melalui SIG dan teknologi digital sesuai dengan perkembagnan teknologi saat ini, serta kerjasama dengan para pengelola penyedot tangki tinja swasta.

**Daftar Pustaka**

**Buku-Buku:**

Dye, Thomas R. 2016. *Understanding Public Policy.* Pearson Education.

Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rusli, B. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif.*  Bandung : Hakim Publishing.

Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan. 2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik.* Yogyakarta : Balairung & Co.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementari Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Susanti.,et al (2018). Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor. Jurnal Teknologi Lingkungan e-ISSN 2548-6101 Vol 19, No 2, Juli 2018

Sujarwani (2016). Pelaksanaan Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjung Pinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah). Jurnal ilmu pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. e-ISSN : 2528-0724 Vol. 1 No. 2 September 2016

Sugara (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang. Jurnal Mozaik e-ISSN: 2614-8390 Vol. IX Edisi1 Juli 2017

Chotijah., et al (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) e-ISSN: 2580-8516 Vol. 7 No. 3 Desember 2017

Yuda., et al (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Jurnal Administrasi Publik e-ISSN: 2548-7787 Vol. 8 No. 2 Desember 2018

**Peraturan perundang-Undangan :**

Peraturan pemerintah No. 122 tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik

Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Peraturan Daerah kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 Tentang Organ Dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor. 270 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum Dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung No. 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening Kota Bandung.

**Dokumen lainnya :**

Laporan Tahun 2018 Perusahaan Daerah Air Minum (PPDAM) Tirtawening Kota Bandung

Laporan Tahun 2019 Perusahaan Daerah Air Minum (PPDAM) Tirtawening Kota Bandung

Laporan Tahun 2016-2019 Perusahaan Daerah Air Minum (PPDAM) Tirtawening Kota Bandung

PDAM Tirtawening. 2017. Laporan Akhir : *Bisnis Plan ; PDAM Tirtawening 2017-2021.* Tirtawening : Bandung.